

Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi

<https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI>

This Work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Pengaruh Pengawasan Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lulu Febriana ^(1*) Mahmud ⁽²⁾ Fahrul Mauzu ⁽³⁾

⁽¹⁾ Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

^(2,3) Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

Corresponding author. Lulu Febriana
lulufebriana10@gmail.com

	Abstract
Kata Kunci: Place here five to seven important keywords used in your article, each word separated by a semicolon (;) and typed in a row to the right	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan akrual basis terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Dompu.
Pernyataan Penulis: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.	Desain Penelitian dan Metodologi: Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan teknik analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan SPSS versi 25. Sampel penelitian berjumlah 95 aparatur pengelola keuangan daerah yang dipilih melalui teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria pengalaman kerja dan pemahaman terhadap sistem pelaporan keuangan berbasis akrual.
Copyright © 2025 Atestasi. All rights reserved.	Hasil dan Pembahasan: Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indikator pernyataan valid (nilai korelasi Pearson > r-tabel) dan reliabel (Cronbach's Alpha > 0,70). Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan daerah, dengan kontribusi terbesar ditunjukkan oleh pengawasan internal dan kualitas SDM. Nilai koefisien determinasi (R ²) sebesar 66,6% mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan secara cukup kuat.
	Implikasi: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Pendahuluan

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kualitas laporan keuangan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah dituntut menyajikan informasi keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan tanggung jawab pengelolaan anggaran, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan publik dan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Dompu, sebagai bagian dari entitas pemerintahan daerah di Indonesia, telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan basis akrual bertujuan meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pencatatan seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah secara menyeluruh. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual masih banyak ditemukan, mulai dari aspek teknis hingga kesiapan sumber daya manusia (Irwandi et al., 2019). Kondisi ini berdampak pada kualitas laporan keuangan, baik dari sisi penyajian, akurasi, maupun kelengkapan informasi.

Berdasarkan hasil observasi melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2022, menjadikannya sembilan kali berturut-turut memperoleh predikat tersebut (Tambora Post, 2023). Namun, meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah, hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK masih mengungkapkan sejumlah temuan yang signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, BPK menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu tidak menyetorkan pendapatan retribusi sebesar Rp116.461.530 ke kas daerah, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum pejabat dan pegawai (Dompusiar, 2022). Selain itu, BPK juga menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran di tiga SKPD dengan nilai temuan bervariasi dari ratusan juta hingga lebih dari satu miliar rupiah, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah (Satonda Post, 2021). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun opini WTP telah diraih, masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Salah satu faktor yang turut memengaruhi hal tersebut adalah efektivitas pengawasan internal dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan atau penyimpangan pencatatan transaksi keuangan (Syahputra & Wiratmaja, 2020). Pengawasan internal yang lemah berpotensi menimbulkan kesalahan penyajian informasi keuangan yang berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat. Selain pengawasan internal, faktor penting lainnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang kompeten, khususnya di bidang keuangan dan akuntansi pemerintahan, menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas (Sari & Susanti, 2021). Rendahnya tingkat pemahaman aparatur terhadap standar akuntansi pemerintahan, keterbatasan pelatihan, serta beban kerja yang tinggi menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas SDM sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga untuk menjamin kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam konteks penerapan basis akrual, implementasi yang tidak maksimal dapat menghambat tujuan reformasi akuntansi sektor publik. Penelitian oleh (Nurlis dan Yadiati, 2020) menunjukkan bahwa implementasi basis akrual yang baik dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memperkuat akuntabilitas publik. Namun, keberhasilan penerapan basis akrual tidak semata ditentukan oleh regulasi, melainkan sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, dukungan teknologi, serta pemahaman para pelaksana teknis terhadap prinsip-prinsip akuntansi tersebut. Di beberapa daerah, termasuk Dompu, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan akrual basis, seperti kesulitan dalam pengakuan pendapatan dan belanja non kas, pencatatan aset tetap, serta pengarsipan dokumen pendukung transaksi (Rahmawati et al., 2022). Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal organisasi, di antaranya pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan basis akrual itu sendiri. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Dompu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi peningkatan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami interaksi kompleks antara faktor struktural (pengawasan dan SDM) dan teknis (sistem akuntansi akrual) terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi perumusan

kebijakan peningkatan kapasitas internal pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan transparan di masa mendatang.

Ulasan Literatur

Pengawasan Internal

Menurut (Anthony dan Govindarajan, 2018), pengawasan internal merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang berfungsi untuk memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Selain itu (Ross, 2019) menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen dalam organisasi, dimana pengawasan internal berfungsi sebagai mekanisme untuk mengendalikan perilaku agen agar sesuai dengan kepentingan principal. Pengawasan internal menjadi penting dalam mencegah risiko penyimpangan dan memastikan integritas proses pengelolaan sumber daya (Simanjuntak, 2020). Menurut Institute of Internal Auditors (IIA, 2019), pengawasan internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan jaminan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Teori ini lebih fokus pada bagaimana pengawasan internal beroperasi secara praktis dalam organisasi pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, (COSO Framework, 2018) digunakan sebagai model pengawasan internal yang mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan pengawasan internal berdasarkan COSO Framework membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi kesalahan dan kecurangan. Pengawasan internal dapat diukur melalui indikator seperti efektivitas pengendalian aktivitas, keberlangsungan pemantauan pengawasan, kepatuhan terhadap prosedur, serta kemampuan mendeteksi dan mencegah kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan keuangan (IIA, 2019; COSO, 2018). Indikator ini penting karena mencerminkan kemampuan organisasi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Teori Resource-Based View (RBV) oleh (Barney, 2018) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah aset strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif melalui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka. Sedangkan, menurut (Armstrong, 2018), kualitas SDM ditentukan oleh dimensi seperti kompetensi, motivasi, dan keterlibatan karyawan dalam tugas yang diembannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, SDM yang kompeten dan bermotivasi tinggi akan mendorong efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Penerapan manajemen SDM dalam sektor publik menggunakan model Kompetensi Kerja (Manajemen Kompetensi) yang menekankan pengembangan kapasitas, pelatihan, dan evaluasi kinerja pegawai (Nasution, 2020). Model ini memberikan pedoman praktis untuk meningkatkan kualitas SDM agar mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Indikator kualitas SDM meliputi tingkat pendidikan dan pelatihan yang diikuti, pengalaman kerja, kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan, serta disiplin dan motivasi kerja pegawai (Armstrong, 2018; Nasution, 2020). Pengukuran indikator ini penting untuk memastikan SDM mampu melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik.

Penerapan Akruwal Basis

Teori akuntansi modern menegaskan pentingnya penggunaan basis akrual sebagai standar pelaporan keuangan yang dapat memberikan informasi lebih lengkap dan transparan dibanding basis kas (Scott, 2019). Basis akrual mencatat pendapatan dan beban pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Menurut International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Board (2018), penerapan basis akrual dalam sektor publik meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai aset, kewajiban, dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam implementasinya, penerapan basis akrual mengacu pada standar akuntansi

pemerintahan (SAP) yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan secara akrual (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, direvisi 2018). Hal ini memberikan pedoman operasional yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Indikator akrual basis mencakup pelaksanaan pencatatan transaksi secara akrual, pengakuan aset dan kewajiban secara tepat waktu, penyusunan laporan keuangan yang komprehensif dan konsisten, serta penggunaan sistem informasi akuntansi yang mendukung akrual (IPSAS Board, 2018; Pemerintah Indonesia, 2018). Indikator ini membantu mengukur tingkat kepatuhan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan standar akuntansi akrual.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teori Informasi Akuntansi (Accounting Information Theory) oleh (Scott, 2019) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan mencerminkan relevansi, reliabilitas, dan kelengkapan informasi yang disajikan. (Halim, 2019). Menurut (Arens et al. 2019), kualitas laporan keuangan meliputi aspek relevansi, keandalan, pemahaman, dan keterbandingan informasi yang disajikan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kualitas laporan keuangan merupakan refleksi dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, seperti SAP dan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (SAKPD), menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (BPK RI, 2020). Kepatuhan terhadap standar ini diharapkan menghasilkan laporan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Indikator kualitas laporan keuangan mencakup keakuratan data, kelengkapan informasi, penyajian tepat waktu, konsistensi penerapan standar akuntansi, serta transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik (Arens et al., 2019; BPK RI, 2020). Indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas pengelolaan keuangan dan pelaporan pemerintah daerah.

Desain Penelitian dan Metodologi

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif dan desain survei eksplanatori untuk menguji pengaruh pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Tujuan utamanya adalah menganalisis hubungan antar variabel secara statistik dan menguji hipotesis secara objektif. Populasi penelitian mencakup 110 aparatur pengelola keuangan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk bendahara, pejabat penatausahaan keuangan, kepala sub bagian keuangan, dan staf akuntansi. Dari populasi tersebut, sampel sebanyak 95 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria telah bekerja minimal satu tahun dan memahami praktik pelaporan berbasis akrual.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara: data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup yang menggunakan Skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi responden terhadap setiap variabel, sementara data sekunder berupa dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2023 digunakan untuk mendukung konteks penelitian. Data kuantitatif yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan program SPSS versi 25. Proses analisis diawali dengan uji kualitas instrumen, yaitu uji validitas (korelasi Pearson) dan uji reliabilitas (Cronbach's Alpha). Setelah instrumen terbukti valid dan reliabel, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Shapiro-Wilk), uji multikolinearitas (VIF dan Tolerance), serta uji heteroskedastisitas (Uji Glejser). Tahap akhir adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis, yang mencakup uji signifikansi parsial (Uji t), uji signifikansi simultan (Uji F), dan pengukuran kekuatan model melalui koefisien determinasi (R^2).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Dompu, dengan fokus pada sistem pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Sebagai entitas pemerintahan daerah di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Dompu bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penelitian ini mencakup berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, di mana para aparatur pengelola keuangan yang terdiri dari bendahara, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), kepala sub bagian keuangan, dan staf akuntansi menjadi unit analisis utama. Oleh karena itu, objek penelitian tidak hanya terbatas pada dokumen dan laporan, tetapi juga mencakup proses, praktik, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam siklus akuntansi dan pelaporan keuangan di wilayah tersebut.

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Indikator	Korelasi Pearson
Pengawasan Internal (X ₁)	X _{1_1}	0.975
	X _{1_2}	0.971
	X _{1_3}	0.982
	X _{1_4}	0.962
	X _{1_5}	0.968
Kualitas SDM (X ₂)	X _{2_1}	0.957
	X _{2_2}	0.959
	X _{2_3}	0.957
	X _{2_4}	0.959
	X _{2_5}	0.955
Penerapan Akrual Basis (X ₃)	X _{2_1}	0.958
	X _{2_2}	0.970
	X _{2_3}	0.951
	X _{2_4}	0.943
	X _{2_5}	0.956
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y ₁	0.965
	Y ₂	0.979
	Y ₃	0.954
	Y ₄	0.953
	Y ₅	0.969

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025

Tabel 1 menunjukkan hasil uji validitas untuk seluruh item pernyataan dalam angket penelitian. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson, dengan jumlah responden sebanyak 95 orang sehingga nilai r tabel yang digunakan sebagai acuan adalah sebesar 0,202 pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dua arah dan derajat bebas ($df = 93$). Seluruh nilai korelasi Pearson untuk item pada keempat variabel berada di atas 0,90, yang berarti jauh melebihi batas minimum r tabel tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada variabel Pengawasan Internal (X₁), Kualitas Sumber Daya Manusia (X₂), Penerapan Akrual Basis (X₃), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini. Validitas yang tinggi ini juga menunjukkan bahwa item-item tersebut mampu mengukur konstruk variabel yang dimaksud secara akurat dan konsisten.

Tabel 2. Hasil uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengawasan Internal	0.994	Reliabel
Kualitas Sumber Daya Manusia	0.991	Reliabel
Penerapan Akrual Basis	0.991	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0.992	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025

Tabel 2 menunjukkan hasil uji reliabilitas terhadap instrumen angket yang digunakan dalam penelitian. Hasil pengujian menggunakan metode Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa keempat

variabel dalam penelitian ini memiliki nilai alpha di atas 0,70, yaitu antara 0,991 hingga 0,994. Nilai tersebut menandakan bahwa setiap variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi.

Menurut (Hair et al. 2017), nilai Cronbach's Alpha yang baik adalah di atas 0,70. Apabila nilai berada di atas 0,90, maka instrumen dinyatakan sangat reliabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel dan layak digunakan untuk pengumpulan data lebih lanjut.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Sig. (Shapiro-Wilk)	Keterangan
Pengawasan Internal	0.327	Normal
Kualitas SDM	0.114	Normal
Penerapan Akrua Basis	0.354	Normal
Kualitas Laporan Keuangan	0.391	Normal

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk yang ditampilkan pada Tabel 3, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data untuk variabel Pengawasan Internal (X1), Kualitas SDM (X2), Penerapan Akrua Basis (X3), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, sehingga data layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda pada tahap selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengawasan Internal	0.960	1.041	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas SDM	0.962	1.040	Tidak terjadi multikolinearitas
Penerapan Akrua Basis	0.984	1.017	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel Pengawasan Internal (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), dan Penerapan Akrua Basis (X3) dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.	Keterangan
Pengawasan Internal	-0.044	0.036	-1.208	0.230	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kualitas SDM	0.003	0.036	0.089	0.929	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Penerapan Akrua Basis	0.059	0.039	1.524	0.131	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 5, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan antara nilai absolut residual dengan masing-masing variabel bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak untuk digunakan dalam pengujian regresi lebih lanjut.

Tabel 6. Hasil Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.816	0.666	0.655	1.89090

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	647.851	3	215.950	60.397
	Residual	325.370	91	3.575	
	Total	973.221	94		

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025

Pada tabel 6, secara keseluruhan model regresi ini memiliki kemampuan yang baik untuk menjelaskan kualitas laporan keuangan. Sisanya, yaitu sebesar 33,4% (100% - 66,6%), dijelaskan oleh

variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara simultan, ketiga variabel independen yaitu Pengawasan Internal (X₁), Kualitas Sumber Daya Manusia (X₂), dan Penerapan Akrua Basis (X₃) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Dengan demikian, model regresi yang dibangun dinyatakan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel.

Tabel 8. Hasil Uji T

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Keterangan
(Konstanta)	-1.158	1.512	-	-0.766	0.446	Tidak signifikan
Pengawasan Internal	0.512	0.060	0.524	8.469	0.000	Signifikan
Kualitas SDM	0.472	0.061	0.481	7.784	0.000	Signifikan
Penerapan Akrua Basis	0.280	0.065	0.263	4.308	0.000	Signifikan

Sumber: Output SPSS 25, diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 8, seluruh variabel independen memiliki nilai p-value (Sig.) < 0,05. Hal ini berarti bahwa:

- Pengawasan Internal (X₁) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- Kualitas SDM (X₂) juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- Penerapan Akrua Basis (X₃) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diatas, diketahui bahwa variabel Pengawasan Internal (X₁) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000, yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Nilai t-hitung sebesar 8.469 juga jauh melebihi t-tabel pada df = 91, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh X₁ terhadap Y signifikan secara statistik. Dengan demikian, Pengawasan Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Darmawan, 2021) yang menyimpulkan bahwa pengawasan internal berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan daerah. Demikian pula, (Ningsih et al. 2020) menemukan bahwa sistem pengawasan internal yang kuat mampu mencegah penyimpangan keuangan dan memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks Kabupaten Dompu, hal ini memperkuat dugaan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kontrol dan audit internal yang dijalankan secara konsisten. Faktor utama yang mempengaruhi hasil ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kedisiplinan OPD dalam menerapkan sistem pengawasan, termasuk fungsi audit internal, pengendalian prosedur pencatatan transaksi, serta evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Berdasarkan hasil angket, sebagian besar responden menyatakan bahwa pengawasan internal telah berjalan cukup sistematis dan terkoordinasi melalui SOP serta adanya peran aktif dari Inspektorat Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem pengawasan internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pengawasan internal yang efektif menjadi fondasi penting dalam mendukung akuntabilitas publik dan menciptakan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 9, variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X₂) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Nilai t-hitung sebesar 7.784 menunjukkan bahwa X₂ berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini diperkuat oleh penelitian (Hidayah & Supriyono, 2021) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik, terutama dalam pemahaman akuntansi dan regulasi pemerintah, memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan penyusunan

laporan keuangan yang akurat dan andal. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Permata dan Sulastri, 2020) yang menemukan bahwa aparatur yang kompeten dan terlatih memiliki kecenderungan untuk menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas informasi yang lebih tinggi, baik dalam hal relevansi, keandalan, maupun kepatuhan terhadap standar.

Faktor-faktor yang mendukung hasil ini mencakup tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan teknis yang diterima oleh aparatur pengelola keuangan di OPD Kabupaten Dompu. Berdasarkan hasil penyebaran angket, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau manajemen, serta telah mengikuti pelatihan sistem akuntansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi teknis mereka cukup memadai untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas SDM, baik melalui pendidikan formal maupun pengembangan kompetensi berkelanjutan, sangat penting dalam rangka mendorong akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan daerah. SDM yang kompeten akan mampu menjalankan fungsi akuntansi secara sistematis dan sesuai regulasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah.

Pengaruh Penerapan Akrual Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil uji t yang ditunjukkan pada Tabel 9 memperlihatkan bahwa variabel Penerapan Akrual Basis (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Nilai t-hitung sebesar 4.308 juga menunjukkan bahwa X3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, secara parsial dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akrual Basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Rahayu dan Suranta, 2020) yang menyatakan bahwa penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan mampu meningkatkan transparansi, relevansi, dan integritas laporan keuangan publik. Selain itu, studi oleh (Mustakim et al. 2021) juga menunjukkan bahwa implementasi akrual basis secara tepat memungkinkan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan yang lebih komprehensif dan mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya.

Faktor yang turut memengaruhi hasil ini antara lain adalah sejauh mana pemahaman dan kesiapan aparatur dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Hasil angket menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah terbiasa menggunakan basis akrual dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, meskipun beberapa masih menghadapi tantangan teknis seperti keterbatasan sistem dan integrasi data aset. Namun, secara umum, penerapan akrual basis telah berjalan dengan cukup baik di lingkungan OPD Kabupaten Dompu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akrual basis memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Basis akrual memungkinkan pencatatan transaksi keuangan yang lebih realistis, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat, dapat dipercaya, dan relevan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Pengaruh Pengawasan Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Akrual Basis secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan akrual basis secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. Hasil uji F yang ditampilkan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0.000, yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Nilai F-hitung sebesar 60.397 dan R Square sebesar 0.666 menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan dan layak digunakan. Hal ini berarti bahwa pengawasan internal (X1), kualitas sumber daya manusia (X2), dan penerapan akrual basis (X3) secara bersama-sama memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Secara statistik, 66,6% variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Temuan ini didukung oleh penelitian terdahulu, seperti studi oleh (Pratiwi dan Lestari, 2021) yang menunjukkan bahwa kombinasi pengawasan yang memadai, SDM yang kompeten, dan sistem akuntansi berbasis akrual mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. (Sari dan Hidayat, 2022) juga menemukan bahwa faktor-faktor internal seperti sistem kontrol dan kualitas tenaga keuangan memiliki kontribusi besar terhadap keterandalan informasi laporan keuangan sektor publik. Faktor-faktor yang memperkuat pengaruh simultan ini dalam konteks Kabupaten Dompu antara lain adalah adanya kebijakan pengawasan internal yang aktif, SDM bidang keuangan yang telah mengikuti pelatihan teknis, serta penerapan akrual basis yang cukup merata di seluruh OPD. Kolaborasi antara ketiga aspek tersebut membentuk sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Dengan demikian, hasil analisis mendukung hipotesis H1, yaitu bahwa pengawasan internal, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan akrual basis secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. Penemuan ini menegaskan pentingnya pendekatan sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan laporan yang andal dan sesuai standar pemerintahan berbasis akrual.

Kesimpulan

Pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik mekanisme pengawasan internal yang dijalankan oleh OPD, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SDM yang kompeten, memahami sistem akuntansi berbasis akrual, dan memiliki pengalaman kerja yang cukup mampu meningkatkan keandalan dan akurasi laporan keuangan. Penerapan akrual basis juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Implementasi akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan standar pemerintah mendukung penyajian informasi keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan relevan. Secara simultan, ketiga variabel independen (pengawasan internal, kualitas SDM, dan penerapan akrual basis) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan, dengan R^2 sebesar 0,666, yang berarti bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 66,6% variasi dari kualitas laporan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu perlu terus memperkuat fungsi pengawasan internal, tidak hanya sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai mekanisme evaluatif terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang keuangan perlu menjadi prioritas, melalui pelatihan teknis, workshop akuntansi berbasis akrual, dan pembinaan berkelanjutan agar staf keuangan mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelaporan yang baik. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi akrual basis agar tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lanjutan dapat menambahkan variabel lain seperti penggunaan teknologi informasi, transparansi anggaran, atau peran auditor internal, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Referensi

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2018). *Management control systems* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (15th ed.). Pearson.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2018). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed.). Pearson.

- Arfianto, A., & Mardijuwono, A. W. (2020). Pengaruh pengawasan internal, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(6), 1-15.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2019). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2023). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. BPK RI.
- Barney, J. B. (2018). *Resource-based theory: Creating and sustaining competitive advantage*. Oxford University Press.
- Becker, B. E., & Huselid, M. A. (2019). High performance work systems and firm performance: A synthesis of research and managerial implications. *Academy of Management Journal*.
- Dechow, P. M., Ge, W., & Schrand, C. (2018). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 344-401.
- Dessler, G. (2019). *Human resource management (15th ed.)*. Pearson.
- Dompusiar. (2022, Januari). LHP BPK mengarah ke anggaran retribusi Dishub Dompu. <https://www.dompusiar.net/2022/01/lhp-bpk-mengarah-ke-anggaran-retribusi.html>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2017). *Multivariate Data Analysis (7th ed.)*. Pearson Education.
- Halim, A., & Sari, R. (2019). Analisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 150-162.
- Handayani, R., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh penerapan basis akrual, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 318-344.
- Hidayah, N., & Supriyono, E. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1), 45-58.
- Irwandi, I., Mariana, Y., & Destriana, N. (2019). Pengaruh kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(6), 1-15.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual*.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2018). *Human resource management (15th ed.)*. Cengage Learning.
- Mulawarman, A., & Siregar, S. V. (2019). Implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah: Tantangan dan peluang. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 15(2), 123-136.
- Mulawarman, M., & Siregar, E. (2019). Implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 123-135.
- Mustakim, M., Hasanah, H., & Dewi, A. N. (2021). Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 112-124.
- Ningsih, R., Ramadhan, F., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 88-95.
- Nobes, C., & Parker, R. (2018). *Comparative international accounting (13th ed.)*. Pearson.
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2018). *Fundamentals of human resource management (7th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Nugroho, A., & Wibowo, S. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 45-54.
- Nugroho, Y., & Wibowo, A. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual di pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 45-58.

- Nurlis, & Yadiati, W. (2020). Akuntansi akrual dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 312–330.
- Pemerintah Kabupaten Dompu. (2024). Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Dompu tahun 2023 (Unaudited). BPKAD Dompu. <https://dompukab.go.id>
- Pemerintah Kabupaten Dompu. (2024). Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dompu. <https://dompukab.go.id>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permata, Y., & Sulastrri, L. (2020). Kompetensi SDM dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Sebuah Kajian di Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 25–33.
- Pratiwi, R., & Lestari, S. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 13(1), 25–36. <https://doi.org/10.31289/jap.v13i1.6543>
- Puspitasari, D. (2019). Penerapan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 5(1), 45–58.
- Rahayu, S., & Suranta, E. (2020). Penerapan Basis Akrual dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 134–143.
- Rahmawati, D., Setyawan, E., & Marpaung, B. (2022). Tantangan implementasi akuntansi akrual di pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 45–56.
- Sari, D. P., & Hartono, J. (2020). Evaluasi penerapan basis akrual di pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 101–114.
- Sari, F., & Darmawan, D. (2021). Peran Pengawasan Internal dalam Menunjang Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 6(1), 77–86.
- Sari, F., & Hidayat, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(2), 88–97. <https://doi.org/10.31289/jakd.v6i2.7125>
- Sari, N. L., & Susanti, A. (2021). Pengaruh kompetensi dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 123–135.
- Satonda Post. (2021, November). Temuan LHP BPK, tiga SKPD di Dompu menyebabkan kerugian negara. <https://www.satondapost.com/2021/11/temuan-lhp-bpk-tiga-skpd-di-dompu.html>
- Sawyer, L. B. (2019). *Sawyer's internal auditing: The practice of modern internal auditing* (7th ed.). The Institute of Internal Auditors.
- Scott, W. R. (2019). *Financial accounting theory* (7th ed.). Pearson.
- Susanti, E., & Pratiwi, M. W. (2021). Pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, dan penerapan akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 25–34.
- Sutaryo, & Sinaga, I. D. (2018). Pengaruh kapasitas SDM dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 226–240.
- Syahputra, H., & Wiratmaja, I. K. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2(1), 1–10.
- Syahputra, R., & Wiratmaja, H. (2020). Pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–16.
- Tambora Post. (2023, Mei 12). Pemkab Dompu raih opini WTP 9 kali berturut-turut dari BPK. <https://tamborapost.com/2023/05/12/pemkab-dompu-raih-opini-wtp-9-kali-berturut-turut-dari-bpk>
- Wahyuni, S. R., & Sari, P. (2021). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi pengaruh pengawasan internal dan sumber daya manusia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 18(3), 234–248.

Wahyuni, S., & Sari, P. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 456-470.